

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta, 2005.
- Agus Riyanto , *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*, Yogyakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta, 2006.
- Sucahyo, Yudho Giri dan Yova Ruldeviyani, *Implementasi eProcurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik*. Jakarta: LKPP, 2009.
- Adrian Sutedi, “*Aspek Hukum. Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Pembangunan Nasional “Veteran”, Universitas. *Panduan Penelitian Tesis*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. 2023.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* , Jakarta: Kencana, 2010
- Mamudji, "*Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*" (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*, Jakarta : Erlangga, 2010
- Ramli, Samsul. *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016.

- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini, et.al., *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiran RI, 1993/1994.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, “Upaya Administratif sebagai Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara,” *Arena Hukum*, 2018.
- Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, CV.Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Much. Nurachmad, *Buku Pintar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visimedia, 2011.
- Sjahan Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cetakan ke-6, Op.cit, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta, 2013
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT. Presindo, Yogyakarta, 2010
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang “*Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang “*Perlindungan Konsumen*”

Rahmansyah, 2023

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT PEMBATALAN HASIL LELANG PENGADAAN PICTURE ARCHIVING COMMUNICATION SYSTEM 93

(Analisa Putusan Nomor:59/Pdt G 2017/PN BNA)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

{ www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id }

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang “*Administrasi Pemerintah*”

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang “*Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*”

Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 Perubahan Kedua tentang “*Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*”

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 Perubahan Ketiga tentang “*Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*” Perubahan dari perpres 54 tahun 2010.

Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 Perubahan Terakhir tentang “*Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*” Perubahan terakhir dari perpres 16 tahun 2018.

Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (Perlem LKPP) nomor 9 Tahun 2018 tentang “*Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah*”

Jurnal

Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan barang Dan Jasa*, Yogyakarta, Genta Publishing, (2010).

Situmeang, I. S, “*Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, (2017).

Sanjaya, D., Siregar, R., & Windha, *Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. *TRANSPARENCY Jurnal Hukum Ekonomi*, (2013).

H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, (2010).

Atik Winanti, “*Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Coronanusantara*”: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, (2021).

Indah sari, “*Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2020).

Rahmansyah, 2023

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT PEMBATALAN HASIL LELANG PENGADAAN PICTURE ARCHIVING COMMUNICATION SYSTEM 94

(Analisa Putusan Nomor:59/Pdt G 2017/PN BNA)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

{ www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id }

- Muten Nuna, (et.al.), “*Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat*”, University of Bengkulu Law Journal, No.2,Vol.5, (2020).
- Riski Syandri Pratama,"*Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Alternatif Peyeleasian Sengketa*", Jakarta, IFPI Publishing, (2023).
- Dani Habibi “*Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgerecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat,*” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, (2019)
- Wahyu Purnomo (et.a)l, “*Analysis of Lawsuit Against the Factual Action which Conducted by Military after Law Number 30 Year 2014 Concerning Government Administration,*” Unram Law Review, 2020.
- Bagir Manan, “*Sistem Peradilan Berwibawa*”, FH UI Press, Jakarta, 2005.

Putusan-Putusan

Putusan Perkara Nomor 59/Pdt.G/2017/PN.Bna

Internet/sumber lainnya.

KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved Mei 19, 2022, from <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>. 2018